

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD RIDWAN**  
NBI : 1312000258

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD RIDWAN**

**NBI : 1312000258**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD RIDWAN**

**NBI : 1312000258**

**FAKULTAS HUKUM.**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD RIDWAN**

**NBI : 1312000258**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H.**

**NPP/NIP : 20310210845**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

ii

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh :

**MUHAMMAD RIDWAN**

**NBI : 1312000258**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 26 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 529/ST/FH/VI/2024**

**Tanggal : 05 Juni 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.  
NPP : 20310210845**

**Anggota : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.  
NPP : 20310130613**

**Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312000258

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Evidence Of Law:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Muhammad Ridwan  
NPM : 1312000258

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NPM : 1312000258

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Evidence Of Law:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Muhammad Ridwan**  
NPM : 1312000258

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan  
NIM : 1312000258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Muhammad Ridwan**

NPM : 1312000258



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan

NBI : 1312000258

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya :

Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan/Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PENUNTUTAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 26 Juni 2024

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Ridwan**

NPM : 1312000258

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Keluarga saya khususnya untuk kedua orang tua saya, Ibu dan Ayah saya, terima kasih banyak untuk dukungan, do'a dan kerja keras Ibu dan Ayah selama ini, akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini karena do'a, dukungan dan kerja keras ibu dan Ayah. Sehat selalu Buk...Yah...*

*Diri saya sendiri, terima kasih sudah bisa bertahan sampai detik ini. Adik saya, semangat terus ya sekolahnya belajar yang pintar biar tercapai cita-citanya.*

*Orang Terkasih saya Cholifatul Islamiah, Terima kasih karena selalu menemani, membantu dan juga memberikan semangat*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya juga memiliki banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi, namun hal tersebut dapat dilewati dengan baik pada akhirnya karena mendapatkan bantuan dan juga bimbingan baik secara materiil dan immateriil. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Ibu saya Nur Handayani , Ayah saya Abdullah, dan Adik saya Rifqah Putri Dwindi Aila yang selalu memberikan dukungan dan do’a untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaiknya dalam penulisan skripsi ini.
6. Cholifatul Islamiah S.H., sebagai seseorang yang terkasih selalu membantu dan mendukung saya dalam keadaan apapun dan selalu ada di saat saya mengalami kesulitan.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Hormat Saya,

Muhammad Ridwan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesifikasi atau perincian dalam tindak pidana pencucian uang serta kekuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat bukti dalam upaya menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindakan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai spesifikasi pembuktian meliputi spesifikasi pembuktian berdasarkan ketentuan perundang-undangan, praktik pembuktian oleh aparat penegak hukum, kendala dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan kekuatan pembuktian LHKPN dalam tindak pidana pencucian uang melalui kasus konkret yang menggunakan LHKPN sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkaranya dengan menganalisis kekuatan pembuktian dari LHKPN sebagai alat bukti dalam proses penuntutan perkara serta upaya penggunaan LHKPN sebagai pembuktian terbalik dalam proses persidangan. Kewenangan hakim pada pendapat ini mengenai mutu alat bukti. Hakim mengevaluasi dan memutuskan apakah suatu alat bukti tepat jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut juga berlaku demikian pada LHKPN sebagai alat bukti, dengan adanya ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit mengenai LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menimbulkan keraguan dan perdebatan antara para hakim di pengadilan mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti.

**Kata Kunci :** LHKPN, Kekuatan Pembuktian, Pencucian Uang, Spesifikasi

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the specifications or details of the crime of money laundering as well as the strength of the State Administrator's Wealth Report (LHKPN) as evidence in an effort to make the crime of money laundering an illegal act. This research uses normative legal research methods that utilize primary, secondary and tertiary. legal literature as well as statutory, conceptual and case approaches. This research will discuss the specifications of evidence including the specifications of evidence based on statutory provisions, evidence practices by law enforcement officials, obstacles in proving money laundering crimes, and the strength of LHKPN evidence in money laundering crimes through concrete cases that use LHKPN as evidence. in the process of proving the case by analyzing the evidentiary strength of the LHKPN as evidence in the case prosecution process as well as efforts to use the LHKPN as reverse evidence in the trial process. The judge's authority in this opinion concerns the quality of the evidence. The judge evaluates and decides whether a piece of evidence is appropriate when compared with other pieces of evidence. This also applies to LHKPN as evidence, with the unclear formulation in explicitly defining LHKPN as evidence in the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering, which has given rise to doubt and debate among judges in court regarding the validity of LHKPN as evidence.*

**Keyword :** *LHKPN, Power of Proof, Money Laundering, Specifications*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1. Tinjauan tentang Pembuktian .....	17
2.1.1. Pengertian Pembuktian .....	17

2.1.2.	Kekuatan Pembuktian Menurut KUHP	17
2.1.3.	Teori Pembuktian	22
2.2.	Tinjauan Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	23
2.2.1.	Pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	23
2.2.2.	Pengaturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	23
2.2.3.	Manfaat LHKPN	25
2.3.	Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	26
2.4.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	39
3.1.	Spesifikasi Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	39
3.1.1.	Spesifikasi Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku	39
3.1.2.	Praktik Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	52
3.1.3.	Kendala Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	57
3.2.	Kekuatan Pembuktian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	64
3.2.1.	Analisis Kekuatan Pembuktian LHKPN	64
3.2.2.	Upaya Peningkatan Kekuatan Pembuktian LHKPN	77
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	89
4.1	Simpulan	89
4.2	Saran	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		92

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Tata Cara Pelaporan LHKPN Dengan Formulir